**Scaffolding:** Jurnal Pendidikan Islam dan Multikulturalisme
Vol. 4, No. 2 (2022): 400-414

# PERSEPSI REKOGNISI HAK-HAK SIPIL SISWA SMA DI DKI JAKARTA

**Maneger Nasution[1], Bunyamin[2], Muhammad Azhar Nawawi[3], Ahmad Ruslan[4], Gery Erlangga[5], Herdin Muhtarom[6], Ayu Kurnia Pratiwi[7]**
*Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA*
*Email: bunyamin@uhamka.ac.id*

**Abstract:** This research is a study of the recognition of civil rights related to human values around tolerance, social solidarity, freedom, and responsibility. The purpose of this study is to find out how the perception of recognition of students' civil rights in DKI Jakarta. The research approach used in this study is quantitative. This study used a questionnaire data collection technique with a Likert scale model. The data analysis technique used in this study is a descriptive statistical analysis technique through percentage calculations. The results of this study show that the civil rights of students in the school environment have been recognized or upheld through the policies of educational institutions and in academic activities carried out in the school environment.

**Keywords:** Civil; Perception; Students; Social.

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu faktor esensial dalam kehidupan manusia. Melalui pendidikan, manusia dapat mengembangkan keterampilan dan kemampuan yang dimilikinya untuk menjawab tantangan dari perkembangan dunia yang sedang berlangsung hingga saat ini (Nandaniati et al., 2018). Sehingga pendidikan memegang peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sekolah yang menjadi salah satu lembaga pendidikan memiliki tujuan untuk dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dengan kemampuan bersaing dengan dunia global. Dengan demikian, aktualisasi peningkatkan sumber daya manusia pada lembaga pendidikan dapat terlihat melalui proses kegiatan pembelajaran dan pengajaran di kelas (Meilia & Erlangga, 2022).

Proses pendidikan tidak hanya sekedar untuk mengembangkan aspek pengetahuan dan keterampilan. Pendidikan karakter sebagai salah satu aspek dalam proses pendidikan memiliki peran yang tidak kalah penting agar generasi muda memiliki keteguhan karakter, supaya dapat menjalani kehidupan bersama dengan manusia lainnya. Kemampuan untuk hidup bersama secara fisik, sosial, dan kultural meniscayakan menghormati dan menjaga hak-hak manusia terutama dalam aspek toleransi, solidaritas, kebebasan, dan tanggung jawab. Dengan demikian, generasi muda dapat menjamin dan mengimplementasikan hak-hak tersebut dalam kehidupan masyarakat (Arif et al., 2021).

Toleransi menjadi salah satu aspek dalam hak-hak manusia yang sangat penting bagi generasi muda sebagai individu yang tidak dapat terlepas dari kehidupan sosial. Toleransi dalam dunia pendidikan telah menjadi tanggung jawab dari seluruh elemen agar perilaku intoleran

dapat dihindari dalam dunia pendidikan (Suciartini, 2017). Selain toleransi, kondisi global pada saat ini yang diselimuti oleh kemajuan teknologi telah memunculkan urgensi untuk membangun solidaritas sosial dalam diri generasi penerus yang sedang menempuh pendidikan agar mereka dapat saling menghargai satu sama lain dan menjaga hak-hak asasi manusia sehingga dapat terciptanya tujuan bersama (Saidang & Suparman, 2019).

Selanjutnya, aspek tanggung jawab yang menjadi salah satu aspek dalam hak-hak manusia merupakan landasan kuat dalam urusan kemanusiaan baik dalam struktur maupun dalam makna dan kandungannya. Oleh karena itu, tanggung jawab ditempatkan sebagai lambang bagi ketinggian derajat seorang anak manusia. Kebebasan yang dimiliki oleh setiap manusia membuka peluang bagi keleluasaan diri dalam mencari dan menentukan jenis dan corak tindakan moral yang terbebas dari kekuatan-kekuatan yang dapat mengganggu optimalisasi upaya manusia dalam meraih kebahagiaan hakiki yang memang diinginkan oleh setiap manusia berakal (Muhmidayeli, 2017). Sehingga dialektika terkait dengan tanggung jawab dan kebebasan yang dimiliki oleh setiap manusia menjadi suatu keyakinan dasar untuk mengarahkan manusia menjadi bermoral.

Pemahaman terkait dengan hak asasi manusia oleh seluruh individu yang berada di lingkungan sekolah memiliki urgensi yang cukup tinggi agar dalam menjalani kehidupan sosial tidak menindas aspek kemanusiaan yang dimiliki oleh setiap individu. Sebagai salah satu upaya dalam mengantisipasi terjadinya pelanggaran hak-hak asasi manusia dalam ruang lingkup lembaga pendidikan, penanaman pemahaman rekognisi atau pengakuan hak-hak sipil pada siswa menjadi cara yang cukup tepat untuk mencegahnya. Penanaman rekognisi pada siswa dapat dijadikan sebagai salah satu langkah yang harus dilakukan untuk menciptakan sekolah-sekolah yang lebih ramah terhadap hak asasi manusia. Rekognisi merupakan sebuah teori yang dicetuskan oleh Axel Honneth yang memiliki tiga aspek utama dalam kajian teori tersebut. Ketiga aspek tersebut antara lain kekuasaan, pengakuan dan penghormatan (Marta, 2018).

Terkait dengan rekognisi hak-hak sipil siswa di lingkungan sekolah, ditemukan beberapa sektor yang masih menjadi akar permasalahan dari penanaman pemahaman hak-hak sipil siswa. Haifarashin, Furnamasari & Dewi (2021) dalam penelitiannya yang berjudul *"Pemahaman Siswa Tentang Kewajiban dan Hak Warga Negara"* menyebutkan bahwa pengenalan hak-hak warga negara seperti hak sipil dapat dimulai sejak di lingkungan sekolah supaya dalam menjalani kehidupan sehari-hari, siswa dapat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Pendapat tersebut diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitriya, Hidayat & Rizki (2021) berjudul *"Implementasi Kota Layak Anak Melalui Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Bekasi"* yang mengungkapkan bahwa pemenuhan hak-hak anak di lingkungan sekolah dapat menjadi ruang untuk menciptakan generasi muda unggul dan berkualitas.

Penanaman pemahaman siswa terhadap hak-hak sipil di lingkungan sekolah jika tidak didukung oleh stekholder terkait seperti pendidik dan penyelenggara pendidikan. Seperti yang diungkapkan oleh Ilosa & Rusdi (2020) dalam penelitian yang berjudul *"Analisis Pelaksanaan Program Kota Layak Anak (KLA) dalam Memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak di Kota Pekanbaru"* bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam penanaman pemahaman hak-hak sipil siswa terletak pada sumber daya manusia dan sistem regulasi. Pendapat lain diungkapkan oleh Kumala & Listyaningsih (2022) menurut hasil penelitiannya yang berjudul *"Perlindungan pada Peserta Didik dari Tindak Kekerasan di SMA Negeri 2 Trenggalek"* bahwa dibutuhkan sinergi antara pihak sekolah dengan lembaga pemerintahan seperti dinas sosial untuk menciptakan perlindungan hak-hak sipil siswa di lingkungan sekolah. Pendapat tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putro & Kosasih (2021) yang berjudul *"The Gap Between Civil Rights and Other Rights Fulfilment Among Children of Sunda Wiwitan Minority Group of Cireundeu, Cimahi"* mengungkapkan bahwa kendala dalam pemenuhan hak-hak sipil siswa di lingkungan sekolah terjadi apabila tidak adanya kesadaran akan perlindungan hak-hak warga negara di kalangan pemangku kebijakan.

Meninjau penelitian terdahulu yang relevan dengan pembahasan pada artikel ini, penanaman hak-hak manusia terutama dalam konteks hak sipil siswa di lingkungan sekolah masih sebatas konsep dan gagasan serta kendala-kendala yang dihadapi saat proses penanaman hak-hak sipil siswa, belum merujuk terhadap aktualisasi di lingkungan. Sedangkan pada artikel penelitian ini ingin mengungkapkan secara mendalam terkait dengan aktualisasi rekognisi hak-hak sipil siswa di lingkungan sekolah seperti kebijakan sekolah serta fasilitas yang diberikan kepada siswa dalam menunjang penanaman hak-hak sipil siswa di lingkungan sekolah melalui kegiatan pembelajaran di ruang kelas maupun kegiatan non-akademik.

Berdasarkan latar bekalang yang telah diungkapkan, peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang Persepsi Rekognisi Hak-Hak Sipil Pada Siswa di DKI Jakarta. Berhubungan dengan hal tersebut, maka penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu "Bagaimana Fenomena Rekognisi Hak-Hak Sipil Pada Siswa di DKI Jakarta?" Sedangkan tujuan yang hendak diketahui dalam penelitian ini adalah fenomena rekognisi hak-hak sipil pada siswa di DKI Jakarta. Pemahaman mengenai rekognisi terutama yang berkaitan dengan hak-hak sipil merujuk pada nilai-nilai karakter seperti toleransi, solidaritas, kebebasan, dan tanggung jawab yang harus dipahami oleh siswa. Oleh karena itu untuk mengetahui pemahaman rekognisi hak-hak sipil pada siswa di DKI Jakarta, diperlukannya pengungkapan lebih dalam untuk mengetahui persepsi mengenai nilai-nilai karakter dan hak-hak sipil siswa di lingkungan sekolah.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Priyono (2016) menjelaskan bahwa penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan asumsi-asumsi pendekatan positivistik. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah angket dengan model skala likert. Sugiyono (2020) menjelaskan bahwa skala likert merupakan model dalam penggunaan instrumen penelitian jenis angket yang bertujuan untuk mengukur persepsi, pendapat, dan sikap seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Pengambilan data terkait dengan survey persepsi rekognisi hak-hak sipil pada siswa dilakukan di SMA Negeri/Swasta di wilayah DKI Jakarta. Proses pengambilan data dilakukan pada bulan Februari-April secara dalam jaringan (daring). Subjek dalam penelitian ini adalah siswa SMA Negeri/Swasta kelas 11 di wilayah DKI Jakarta dengan jumlah sebanyak 380 siswa.

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis statistik deskriptif melalui perhitungan persentase. Penggunaan teknik analisis statistik deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena atau objek penelitian melalui data yang telah diperoleh dari subjek penelitian atau sampel. Setelah itu data disajikan hingga sampai pada tahap penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Merasakan Kebebasan Berpendapat di Lingkungan Sekolah

Berdasarkan data temuan di lapangan terkait indikator merasakan kebebasan berpendapat di lingkungan sekolah, memperoleh data dengan rincian, 24% menyatakan sangat setuju, 43% menyatakan setuju, 28% menyatakan cukup, 4% menyatakan tidak setuju, dan 1% menyatakan sangat tidak setuju dari total jumlah 380 responden.

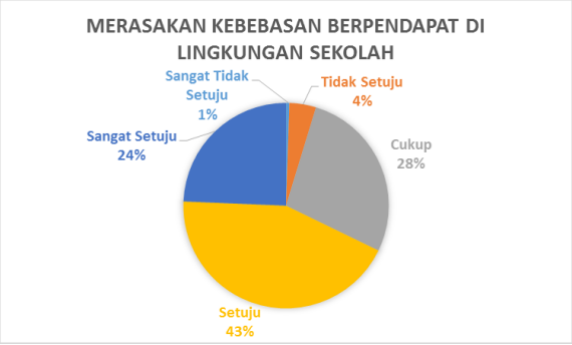


**Gambar 1.** Persentase Indikator Merasakan Kebebasan Berpendapat di Lingkungan Sekolah

Dengan demikian hasil penelitian menunjukan adanya kesesuaian antara teori kebebasan yang dikemukakan oleh Paul Sieghart bahwa kebebasan menjadi momen sentral dalam memanusiakan pemikiran dan perlakuan terhadap kebebasan masing-masing individu tanpa adanya pembatasan dalam berpendapat. Hal tersebut terimplementasikan dalam dunia

pendidikan untuk menukar hasil pemikiran antara individu satu dengan yang lainnya. Pernyataan ini dapat dibuktikan dengan kegiatan diskusi yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung oleh siswa.

Hak-hak kebebasan di lingkungan jika merujuk pada data temuan di lapangan menunjukkan beberapa siswa dari berbagai sekolah di DKI Jakarta mengungkapkan adanya keterbatasan dalam menyampaikan kebebasan berpendapat di lingkungan sekolah. Hal tersebut dapat dipengaruhi karena adanya dua faktor yakni faktor internal dan eksternal yang menyebabkan siswa merasa tidak mendapatkan kebebasan dalam berpendapat.

**Mendapatkan Hak dalam Kebebasan Berpendapat di Lingkungan Sekolah**

Berdasarkan data temuan di lapangan terkait indikator mendapatkan hak kebebasan berpendapat di lingkungan sekolah, memperoleh data dengan rincian, 30% menyatakan sangat setuju, 42% menyatakan setuju, 26% menyatakan cukup, 2% menyatakan tidak setuju, dan 0% menyatakan sangat tidak setuju dari total jumlah 380 responden.

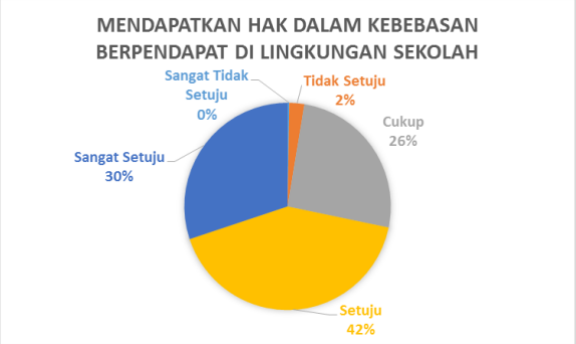


**Gambar 2.** Persentase Indikator Mendapat Hak dalam Kebebasan Berpendapat di Lingkungan Sekolah

Dengan demikian hasil penelitian menunjukkan adanya kesesuaian antara teori kebebasan yang dikemukakan oleh Paul Sieghart bahwa secara keseluruhan siswa SMA di DKI Jakarta mendapatkan hak kebebasan berpendapat di lingkungan sekolah yang tercermin dari pemahaman yang didapatkan dari pengalaman kemudian direkonstruksi melalui bertukar pikiran atau diskusi.

**Sekolah Memberikan Kebebasan Berpendapat Terhadap Peserta Didik di Lingkungan Sekolah**

Berdasarkan data temuan di lapangan terkait indikator kesempatan yang diberikan pihak sekolah dalam memberikan kebebasan berpendapat terhadap siswa di lingkungan sekolah, memperoleh data dengan rincian, 32% menyatakan sangat setuju, 45% menyatakan setuju, 21%

menyatakan cukup, 1% dari 380 siswa menyatakan tidak setuju, dan 1% menyatakan sangat tidak setuju dari total jumlah 380 responden.

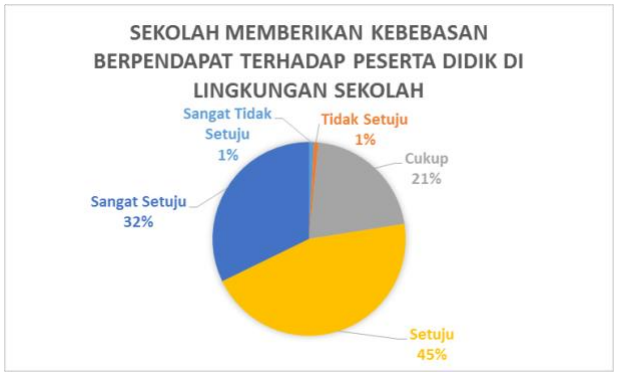


**Gambar 3.** Persentase Indikator Kebijakan Sekolah dalam Memberikan Hak-Hak Kebebasan Berpendapat Pada Siswa di Lingkungan Sekolah

Dengan demikian hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam meningkatkan kebebasan berpendapat di lingkungan sekolah diperlukannya peran pihak sekolah untuk membuat kebijakan dalam mengimplementasikan kebebasan berpendapat di lingkungan sekolah. Hal tersebut relevan dengan teori Paul Sieghart tentang teori kebebasan dalam menyampaikan isi pendapat sebagai hasil pemikiran, mempelajari pengalaman serta berbagai hal di bidang budaya, sosial ilmiah atau seni.

**Mendapatkan Sarana Penunjang dalam Menyalurkan Hak Kebebasan Berpendapat Di Dalam Lingkungan Sekolah**

Berdasarkan data temuan di lapangan terkait indikator fasilitaspenunjang yang dapat digunakan oleh siswa dalam menyalurkan kebebasan berpendapat di lingkungan sekolah, memperoleh data dengan rincian, 17% menyatakan sangat setuju, 44% menyatakan setuju, 34% menyatakan cukup, 4% menyatakan tidak setuju, dan 1% menyatakan sangat tidak setuju dari total jumlah 380 responden.

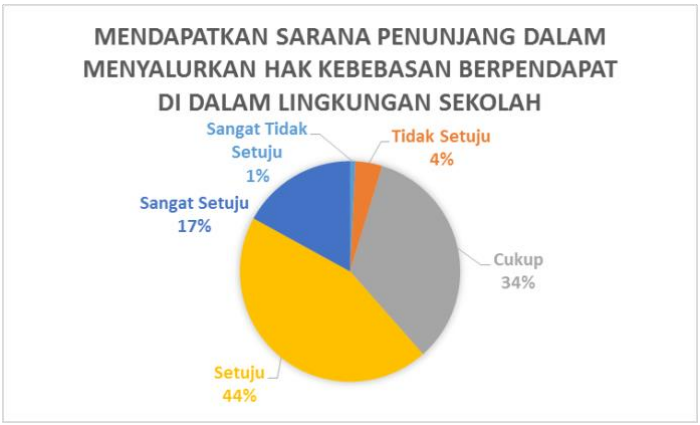


**Gambar 4.** Persentase Indikator Sarana Penunjang dalam Menyalurkan Hak Kebebasan Berpendapat Pada Siswa di Lingkungan Sekolah

Dengan demikian teori Paul Sieghart sangat relevan dengan hasil survey yang ditemukan di lapangan. Merujuk pada prinsip kebebasan Paul Sieghart yang berpendapat dengan cara mendapatkan informasi tentang lingkungan sekitar, mengkonstruksikan segala ide, keyakinan dan mimpi, cara melihat dunia, bertukar pikiran, menyampaikan isi pendapat sebagai hasil pemikiran. Prinsip kebebasan tersebut jika dikaitkan pada kondisi di lingkungan sekolah telah terealisasikan melalui sarana penunjang yang disediakan oleh pihak sekolah. Siswa dapat memanfaatkan fasilitas seperti mading (majalah dinding) dan kotak aspirasi sebagai wadah untuk siswa menyampaikann pendapatnya.

**Mengalami Hambatan Ketika Ingin Mengeluarkan Pendapat di Lingkungan Sekolah**

Berdasarkan data temuan di lapangan terkait indikator hambatan yang dirasakan oleh siswa dalam mengeluarkan pendapat di lingkungan sekolah, memperoleh data denagn rincian, 7% menyatakan sangat setuju, 6% menyatakan setuju, 32% menyatakan cukup, 30% menyatakan tidak setuju, dan 15% menyatakan sangat tidak setuju dari total jumlah 380 responden.

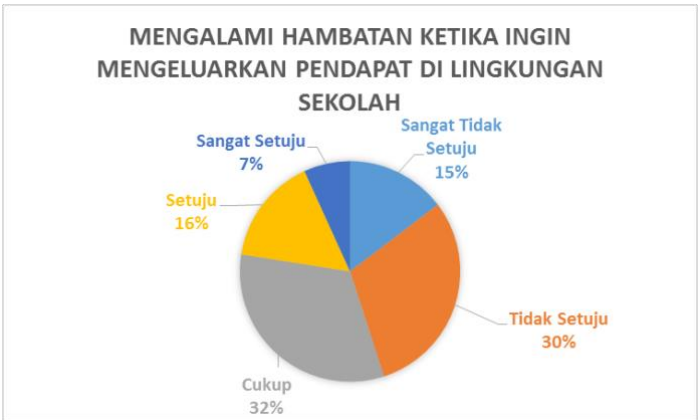


**Gambar 5.** Persentase Indikator Hambatan Siswa dalam Mengeluarkan Pendapat di Lingkungan Sekolah

Dengan demikian teori kebebasan yang dikemukakan oleh Paul Sieghart menunjukkan bahwa proses mengontruksikan segala ide untuk memanusiakan keingintahuan manusia dalam menyampaikan isi pendapat dan bertukar pikiran sebagai hasil pemikiran. Jika dihubungkan dengan kondisi di lingkungan sekolah, terdapat beberapa temuan dari hasil survey menunjukkan adanya hambatan yang dialami siswa untuk mengeluarkan pendapatnya. Hambatan tersebut didasari atas faktor internal seperti pola komunikasi siswa dan faktor eksternal seperti kebijakan dan fasilitas yang disediakan oleh sekolah kurang memadai.

**Pihak Sekolah Sudah Mengatur dalam Kebebasan Berserikat di Lingkungan Sekolah**

Berdasarkan data temuan di lapangan terkait indikator regulasi yang diatur oleh pihak sekolah dalam mewujudkan kebebasan berserikat di lingkungan sekolah, memperoleh data dengan rincian, 16% menyatakan sangat setuju, 42% menyatakan setuju, 35% menyatakan cukup, 6% menyatakan tidak setuju, dan 1% menyatakan sangat tidak setuju dari total jumlah 380 responden.

**Gambar 6.** Persentase Indikator Sekolah Telah Memfasilitasi Kebebasan Berserikat/Berorganisasi di Lingkungan Sekolah

Dengan demikian hasil temuan penelitian di lapangan sangat relevan dengan teori Paul Sieghart mengenai teori kebebasan dalam mengkonstruksikan segala ide, keyakinan dan mimpi, cara melihat dunia, bertukar pikiran, menyampaikan isi pendapat sebagai hasil pemikiran. Hal tersebut dapat dilihat dengan berbagai aktivitas di lingkungan sekolah yang diatur oleh pihak sekolah dalam mewadahi siswa untuk mendapatkan hak kebebasan berserikat. Salah satu bukti konkret adanya kebebasan berserikat di lingkungan sekolah yakni tercermin pada kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi internalserta eksternal sebagai wadah siswa untuk berserikat dengan visi-misi yang relevan antara hasil pemikiran.

**Siswa Sudah Mendapatkan Hak Kebebasan Berserikat di Lingkungan Sekolah**

Berdasarkan data temuan di lapangan terkait indikator siswa mendapatkan kebebasan berserikat di lingkungan sekolah, memperoleh data dengan rincian, 18% menyatakan sangat setuju, 44% menyatakan setuju, 33% menyatakan cukup, 4% menyatakan tidak setuju, dan 1% menyatakan sangat tidak setuju dari total jumlah 380 responden.

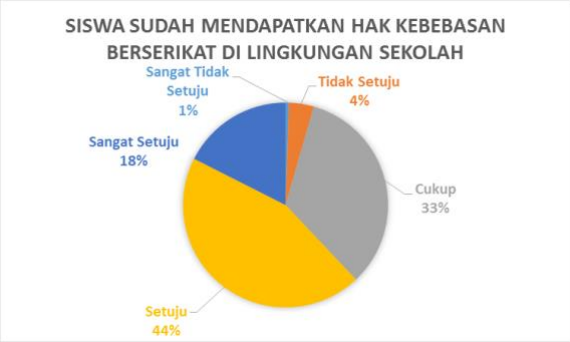


**Gambar 7.** Persentase Indikator Implementasi Hak Kebebasan Berserikat di Lingkungan Sekolah

Dengan demikian kondisi di lingkungan sekolah sudah terdapat kebijakan dalam melakukan hak kebebasan berserikat. Hal tersebut tergambarkan melalui antusias siswa dalam mengikuti kegiatan sekolah seperti ektarkurikuler dan organisasi. Contohnya yakni dengan mengikuti OSIS, Pramuka, PMR, Paskibra maupun ekstakurikuler eksternal di luar sekolah. Sehingga jika meninjau teori Paul Sieghart yang mengemukakan bahwa kebebasan adalah tentang memanusiakan keingintahuan manusia. Dengan mengikuti organisasi, akan memberikan proses memanusiakan tentang keingintahuan siswa dalam menyampaikan pendapat serta berserikat.

**Pihak Sekolah Telah Membuat Peraturan Untuk Siswa Supaya Mendapatkan Perlindungan dari Diskriminasi di Lingkungan Sekolah**

Berdasarkan data temuan di lapangan terkait indikator sekolah menjamin siswa mendapatkan perlindungan dari perilaku diskriminasi di lingkungan sekolah, memperoleh data dengan rincian, 36% menyatakan sangat setuju, 37% menyatakan setuju, 20% menyatakan cukup, 5% menyatakan tidak setuju, dan 2% menyatakan sangat tidak setuju dari total jumlah 380 responden.

**Gambar 8.** Persentase Indikator Kebijakan Sekolah dalam Melindungi Siswa dari Perilaku Diskriminasi di Lingkungan Sekolah

Dengan demikian hasil survey penelitian di lapangan sangat relevan dengan teori pengakuan/rekognisi hak konstitusional Axel Honneth yang dapat ditunjukkan bahwa SMA di DKI

Jakarta terdapat Interaksi dengan lingkungan sekitarnya baik antara siswa dengan guru maupun tenaga kependidikan. Pihak sekolah di DKI Jakarta sudah membuat peraturan sebagai wujud perlindungan untuk terhindar adanya diskriminasi di lingkungan sekolah. Hal tersebut untuk menjadikan basis normative bagi pengakuan dan perjuangan sosial di lingkungan sekolah supaya dapat mengeleminasi segala bentuk disrespect sebagai wujud aspek cinta, hukum, dan solidaritas untuk terhindar adanya diskriminasi.

**Pihak Sekolah Tanggap dalam Mengatasi Kekerasan di Lingkungan Sekolah**

Berdasarkan data temuan di lapangan terkait indikator sikap sekolah dalam mengatasi kekerasan di lingkungan sekolah, memperoleh data dengan rincian, 36% menyatakan sangat setuju, 37% menyatakan setuju, 23% menyatakan cukup, 3% menyatakan tidak setuju, dan 1% menyatakan sangat tidak setuju dari total jumlah 380 responden.

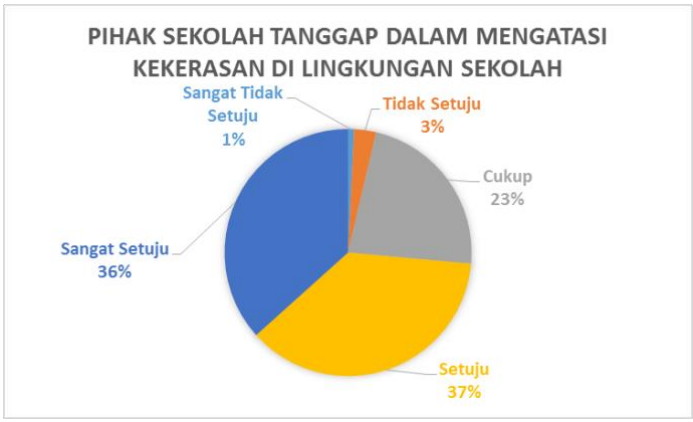


**Gambar 9.** Persentase Indikator Sikap Sekolah dalam Mengatasi Kekerasan di Lingkungan Sekolah

Dengan demikian data temuan di lapangan jika merujuk pada teori Axel Honneth dalam mengatasi kekerasan di lingkungan sekolah dapat diwujudkan melalui proses pemahaman dalam aspek sentral yakni cinta, hukum, dan solidaritas. Hal tersebut terimplementasikan dengan adanya pemberian layanan Bimbingan dan Konseling pada SMA di DKI Jakarta. Kegiatan layanan Bimbingan dan Konseling menjadi salah satu upaya dalam mengatasi dan mencegah tindakan kekerasan di lingkungan sekolah.

**Sekolah Sudah Memberikan Edukasi Mengenai Bentuk Kekerasan dan Diskriminasi di Lingkungan Sekolah**

Berdasarkan data temuan di lapangan terkait indikator upaya preventif yang dilakukan sekolah dalam mengedukasi siswa mengenai fenomena kekerasan dan diskriminasi di lingkungan sekolah, memperoleh data dengan rincian, 32% menyatakan sangat setuju, 39% menyatakan

setuju, 22% menyatakan cukup, 6% menyatakan tidak setuju, dan 1% menyatakan sangat tidak setuju dari total jumlah 380 responden.

**Gambar 10.** Persentase Indikator Peran Sekolah dalam Mengedukasi Siswa Mengenai Pencegahan Kekerasan dan Diskriminasi di Lingkungan Sekolah

Dengan demikian hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah telah memberikan layanan edukasi melalui program Kesiswaan serta Bimbingan dan Konseling tentang aspek sentral untuk menghilangkan bentuk kekerasan dan diskriminasi di lingkungan sekolah. Salah satu bentuk edukasi yang dilakukan oleh Bimbingan dan Konseling yaitu melalui layanan informasi, bimbingan pribadi, bimbingan kelompok, dan bimbingan klasikal. Melalui kegiatan tersebut diharapkan siswa dapat mengetahui bentuk kekerasan dan diskriminasi di lingkungan sekolah agar meminimalisir terjadinya perilaku diskriminasi dan kekerasan.

**Mendukung Siswa Minoritas untuk Mendapatkan Hak Atas Perlindungan dari Kekerasan dan Diskriminasi di Sekolah**

Berdasarkan data temuan di lapangan terkait indikator sikap terbuka para siswa terhadap minoritas di lingkungan sekolah, memperoleh data dengan rincian, 55% menyatakan sangat setuju, 30% menyatakan setuju, 13% menyatakan cukup, 2% menyatakan tidak setuju, dan 0% menyatakan sangat tidak setuju dari total jumlah 380 responden.

**Gambar 11.** Persentase Indikator Sikap Terbuka Terhadap Minoritas untuk Mendapatkan Hak Atas Perlindungan dari Kekerasan dan Diskriminasi di Lingkungan Sekolah

Dengan demikian hasil data penelitian menunjukkan adanya relevansi dengan teori rekognisi Axel Honnet terkait tiga aspek sentral yakni cinta, hukum, dan solidaritas. Siswa setuju untuk saling membela dalam mewujudkan solidaritas sosial agar tetap menjunjung hak-hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, termasuk bagi siswa minoritas.

## Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan rekognisi hak-hak sipil siswa SMA di DKI Jakarta yang diperoleh dari 380 siswa memiliki persepsi yang positif, tidak ada responden yang memiliki persepsi negatif. Sehingga dari hasil penelitian ini dapat terlihat bahwa mayoritas seluruh siswa berpandangan telah mendapatkan rekognisi hak-hak sipil di lingkungan sekolah melalui berbagai kegiatan pembelajaran di kelas maupun regulasi serta fasilitas yang telah disediakan oleh pihak sekolah untuk seluruh siswa agar dapat berinteraksi dan mengeksplore kemampuannya dengan nilai-nilai kebebasan dan hak perlindungan yang terjamin di lingkungan sekolah. Pemberian perlindungan hukum terhadap hak asasi anak merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Sehingga telah menjadi tanggung seluruh pihak yang terlibat untuk menjamin dan merekognisi hak-hak anak di lingkungan sekolah, seperti salah satunya yaitu hak sipil.

Kehadiran lembaga pendidikan berperan strategis sebagai sarana mengembangkan sumber daya manusia. Sehingga dapat menjadi landasan moral nilai-nilai kemanusian. Aktualisasi proses pendidikan yang diiringi dengan wawasan hak asasi manusia dapat menstimulus setiap individu khususnya siswa agar senantiasa mengedepankan sifat humanis (Ruslan et al., 2022). Sehingga pengakuan atau rekognisi terhadap hak-hak sipil siswa di lingkungan sekolah dapat menjadi solusi bagi internalisasi nilai-nilai hak asasi manusia dalam proses penyelenggaraan pendidikan yang lebih ramah terhadap hak kebebasan dan perlindungan anak.

Sekolah yang menjadi salah satu ujung tombak dalam proses penyelenggaraan pendidikan memegang peran sentral dalam mengawasi sekaligus melindungi hak asasi anak karena aktivitas anak banyak menghabiskan waktu di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, sebagai upaya mewujudkan rekognisi/pengakuan terhadap hak-hak sipil siswa di lingkungan sekolah, diperlukannya penguatan melalui pendidikan karakter agar setiap masing-masing siswa memiliki landasan pemahaman yang cukup kuat terkait dengan kewajiban menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan (Damayanti et al., 2020). Dengan demikian upaya dalam menciptakan lingkungan sekolah yang sehat secara fisik dan psikologis dapat terealisasikan dengan baik dan dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam menciptakan sumber daya manusia unggul dan kreatif demi menjawab tantangan persaingan dunia global.

## KESIMPULAN

Pendidikan memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai karakter terutama dalam memberikan pemahaman mengenai rekognisi hak-hak sipil siswa SMA di DKI Jakarta dalam era globalisasi. Upaya tersebut sebagai langkah mengoptimalkan perkembangan dimensi anak secara kognitif, fisik, social-emosional, kreativitas, dan spiritual. Fenomena rekognisi hak-hak sipil pada siswa SMA/Sederajat di DKI Jakarta jika ditinjau dari hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa terkait dengan kebebasan berpendapat di lingkungan sekolah telah terlaksana dengan baik seperti yang ditunjukkan pada persentase data temuan di lapangan yang tercermin pada kebijakan sekolah dalam menyelenggarakan kebebasan berpendapat di lingkungan sekolah dan jenis-jenis kegiatan siswa di lingkungan sekolah yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat.

Terkait dengan fenomena perilaku diskriminasi di lingkungan sekolah secara mayoritas data temuan di lapangan menunjukkan bahwa tidak ditemukannya perilaku diskriminasi di lingkungan sekolah yang dilakukan oleh stekholder sekolah seperti guru, tenaga pendidik maupun siswa itu sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hak-hak sipil siswa SMA di DKI Jakarta yang terkait dengan hak-hak kebebasan dan perilaku diskriminasi di lingkungan sekolah telah mendapatkan pengakuan dari kebijakan serta terimplementasi dengan baik dalam proses penyelenggaraan kegiatan akademik maupun non-akademik.

## BIBLIOGRAFI

Arif, M., Rahmayanti, J. D., & Rahmawati, F. D. (2021). Penanaman Karakter Peduli Sosial Pada Siswa Sekolah Dasar. *Qalamuna - Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, *13*(2), 289–308. https://doi.org/10.37680/qalamuna.v13i2.802

Damayanti, S., Sari, O. N., & Bagaskara, K. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying di Lingkungan Sekolah. *Jurnal Rechtens*, *9*(2), 153–168.

Fitriya, S., Hidayat, R., & Rizki, M. F. (2021). Implementasi Kota Layak Anak Melalui Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Bekasi. *Jurnal Kajian Ilmiah*, *21*(4), 377–390. https://doi.org/10.31599/jki.v21i4.760

Haifarashin, R., Furnamasari, Y. F., & Dewi, D. A. (2021). Pemahaman Siswa Tentang Kewajiban dan Hak Warga Negara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *5*(3), 7261–7265.

Ilosa, A., & Rusdi. (2020). Analisis Pelaksanaan Program Kota Layak Anak (KLA) dalam Memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak di Kota Pekanbaru. *Jurnal Mahasiwa Ilmu Administrasi Publik*, *2*(1), 87–101.

Kumala, D. H. C., & Listyaningsih. (2022). Perlindungan pada Peserta Didik dari Tindak Kekerasan di SMA Negeri 2 Trenggalek. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, *10*(2), 397–411.

Marta, R. F. (2018). Perjuangan Multikulturalisme Perhimpunan Indonesia Tionghoa Dalam Perspektif Rekognisi Axel Honneth. *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, *4*(1), 23–31. https://doi.org/10.30813/bricolage.v4i01.1065

Meilia, A. T., & Erlangga, G. (2022). Aktualisasi Program Kampus Mengajar Sebagai Ruang Kontribusi Mahasiswa Terhadap Pendidikan Dasar di Indonesia. *Metodik DIdaktik; Jurnal Pendidikan Ke-SD-an*, *17*(2), 120–128.

Muhmidayeli. (2017). Kebebasan dan Tanggungjawab Moral: Analisis Filosofis Pencarian Pembenaran Nilai Moral dalam Kaitannya dengan Normativitas Agama. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, *7*(2).

Nandaniati, W., Zakso, A., & Salim, I. (2018). Efektivitas Penggunaan Internet Sebagai Media Pembelajaran Sosiologi Terhadap Hasil Belajar Siswa SMA. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*, *7*(2), 1–10.

Priyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Zifatama Publishing.

Putro, M. Z. A. E., & Kosasih, K. (2021). The Gap Between Civil Rights and Other Rights Fulfilment Among Children of Sunda Wiwitan Minority Group of Cireundeu, Cimahi. *Jurnal HAM*, *12*(3), 485–502.

Ruslan, A., Ahmad, M., Bandarsyah, D., Muhtarom, H., Usahawanto, A. R., & Erlangga, G. (2022). Implementasi Kampus Islami Ramah HAM dengan Menerapkan Nilai-Nilai Toleransi dan Solidaritas di Dunia Pendidikan. *Ar-Risalah*, *20*(1).

Saidang, & Suparman. (2019). Pola Pembentukan Solidaritas Sosial dalam Kelompok Sosial Antara Pelajar. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, *3*(2), 122–126.

Suciartini, N. N. A. (2017). Urgensi Pendidikan Toleransi Dalam Wajah Pembelajaran Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Pendidikan. *Jurnal Penjaminan Mutu*, *3*(1), 12–22. https://doi.org/10.25078/jpm.v3i1.88

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D, dan Penelitian Pendidikan)*. Penerbit Alfabeta.

**© 2022 by the authors**. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).